

Presiden Jokowi Menang Lawan Hakim Pecandu Narkoba di MA

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menang melawan hakim pecandu narkoba, Yudhi Sahputra, yang menggugat pemecatannya. Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Yudhi sehingga pemecatannya itu berkekuatan hukum tetap.

Kasus bermula saat hakim Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Lampung, itu terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinasnya. Kemudian, berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Lampung, Yudhi terbukti mengonsumsi narkoba jenis methamphetamine.

Akibat kejadian itu, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) memecat Yudhi pada April 2019. Yudhi terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Menindaklanjuti pemberhentian Yudhi, Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 86/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Jabatan Hakim atas nama M Yudhi Saputra SH MH.

Yudhi tidak terima den-

gan pemecatannya itu dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan alasan ia tidak diberikan kesempatan membela diri.

Pada 4 Mei 2020, PTUN Jakarta menolak gugatan Yudhi untuk seluruhnya. Majelis yang terdiri atas Susilowati Siahaan, Edi Sapta Surhaza, dan Taufik Perdana menyatakan proses pemberhentian dengan tidak hormat Yudhi sudah sesuai dengan aturan. Yudhi sudah diberi kesempatan membela diri di depan MKH.

Tiga bulan setelahnya, Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jakarta menguatkan putusan itu. Majelis menilai langkah Jokowi memecat Yudhi atas kesalahannya adalah benar. Yudhi masih tidak percaya dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

"Tolak kasasi," demikian amar putusan yang dilansir website panitera MA, Jumat (26/3).

Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Hary Djatmiko dan Is Sudaryono. Putusan yang diketok pada 3 Maret 2021 itu mengantongi nomor perkara 72 K/TUN/2021 dengan panitera pengganti Michael Renaldy Zein. ■ han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



SIDANG EKSEPSI RIZIEQ SHIHAB

Laptop menampilkan suasana sidang kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di halaman Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Jumat (26/3). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi.

Jokowi: Kalau Pasar Dibuka Covid-19 Jadi Naik, Setop Dulu

Jokowi meminta para bupati tidak lengah sedikit pun dalam menangani pandemi. Ia ingin agar testing, tracing, dan treatment terus digalakkan.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo meminta agar para bupati tak tergesa-gesa membuka semua fasilitas publik. Ia mengingatkan bahwa penularan Covid-19 masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pembukaan fasilitas publik mestinya dilakukan per sektor.

"Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau buka pasar Covid-nya naik, hati-hati, setop dulu, per sektor dulu, enggak usah tergesa-gesa semua buka," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jumat (26/3).

Jokowi mengatakan, pen-

anganan Covid-19 berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten, kota, provinsi, ataupun ekonomi nasional. Hal ini ia akui tidak mudah.

Oleh karena itu, kata Kepala Negara, jika pelonggaran suatu sektor ternyata menyebabkan kenaikan kasus kasus virus korona, Jokowi meminta agar pengetatan kembali dilakukan.

"Enggak mudah. Begitu dilonggarkan di sebuah sektor, kita kadang-kadang ngintip terus, ini Covid-nya naik enggak, begitu naik, setop," ujar Jokowi.

Selain sektor perdagangan di pasar, Jokowi juga meminta

pemerintah daerah memperhatikan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Ia ingin para bupati terus memantau detail perkembangan kasus Covid-19 seiring dengan berjalannya kebijakan tersebut.

Jika kebijakan itu ternyata menyebabkan kenaikan kasus virus korona, Jokowi meminta agar pelaksanaannya dihentikan.

"Kalau enggak, Covid-nya enggak dapat, naik terus, ekonominya juga enggak dapat, turun terus. Hati-hati karena ini berhubungan," katanya.

Jokowi meminta para bupati tidak lengah sedikit pun dalam menangani pandemi. Ia ingin agar testing, tracing, dan treatment terus digalakkan. Ia juga meminta supaya daerah-daerah yang berada di zona merah atau zona oranye Covid-19 terus menekan angka penularan virus korona sehingga bisa masuk ke zona hijau atau bebas Covid-19.

Meski tidak mudah, Jokowi menyebutkan, penanganan pandemi harus seimbang antara sektor kesehatan dan ekonomi.

"Percepatan pemulihan ekonomi ini menjadi kunci, tetapi sekali lagi, gas dan remnya ini harus diatur," katanya.

426 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai negara. Namun, vaksin tersebut datang secara bertahap dan sedikit demi sedikit.

Diperkirakan, vaksin akan tiba di Tanah Air dalam jumlah besar pada pertengahan tahun ini.

"Ini awal-awal ini baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa per bulan 60 juta, 70 juta (dosis)," terang Jokowi.

Ia mengatakan, 426 juta dosis vaksin itu diperuntukkan bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa. Jumlah tersebut tidaklah sedikit. Oleh karenanya, kata Jokowi, vaksinasi dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, penyuntikan vaksin sudah mulai menjangkau ke petugas pelayanan publik dan kelompok lanjut usia.

Jokowi pun meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi untuk tempat-tempat yang interaksi masyarakat dan mobilitasnya tinggi. Sebab, di tempat tersebut, potensi penularan virus korona cenderung lebih tinggi.

"Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antar orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan," ujar Jokowi. ■ han



IDN/ANTARA

KPK PERIKSA CITA CITATA

Pedagang Cita Rahayu alias Cita Citata siap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3). Cita Citata diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan Pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 di Kementerian Sosial dengan tersangka Matheus Joko Santoso.

Wali Kota Non-aktif Cimahi Ajay Priatna Segera Disidangkan terkait Kasus Suap

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan kasus suap yang menjerat Wali Kota non-aktif Cimahi, Ajay Muhammad Priatna (AJM). Dengan demikian Ajay Priatna segera disidangkan.

Menurut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, tim penyidik KPK telah melimpahkan berkas penyidikan Ajay Muhammad Priatna ke tahap II atau pada Kamis (25/3) kemarin.

Berkas penyidikan itu terkait kasus dugaan suap perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda tahun anggaran 2018-2020.

"Tim penyidik telah melaksanakan tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka AJM (Ajay Muhammad Priatna) kepada tim JPU dalam perkara dugaan korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan di Kota Cimahi TA 2018-2020," kata Ali melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (26/3).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mempunyai waktu 14 hari kerja untuk merampungkan surat dakwaan Ajay Priatna, sebelum dilakukan persidangan. Rencananya, sidang perdana akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bandung.

"Dalam waktu 14 hari

kerja, tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor. Persidangan diadegankan di PN Tipikor Bandung," jelasnya.

Sejalan dengan adanya pelimpahan tersebut, maka kewenangan penanganan dilanjutkan oleh tim JPU selama 20 hari terhitung sejak, 25 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021 yang tempat penitipan penahanannya masih di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

"Selama proses penyidikan telah diperiksa sebanyak 76 saksi yang diantaranya aparat sipil yang ada di Pemkot Cimahi dan dari unsur swasta yang merupakan para kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Cimahi," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna (AJM) dan Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi, Utama Yonathan (HY) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda tahun anggaran 2018-2020.

Ajay Priatna diduga telah menerima suap sebesar Rp1,661 miliar dari total kesepakatan Rp3,2 miliar. Uang sebesar Rp1,661 miliar itu diterima Ajay Priatna dalam lima kali tahapan dari Utama Yonathan. Uang itu disinyalir berkaitan dengan pembangunan penambahan Gedung RSU Kasih Bunda. ■ mei

ICW Pertanyakan KPK Tak Panggil Sekjen KKP di Kasus Edhy Prabowo

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan dasar argumentasi dari pernyataan Deputy Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto, menyatakan, tidak butuh perlu memeriksa Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, terkait kasus suap ekspor benih lobster.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai, pernyataan deputy penindakan itu bertolak belakang dengan pernyataan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

"Kala itu, Ali secara terang benderang menyebutkan bahwa Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank dan para eksportir kepada Kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan) KKP," kata Kurnia, Kamis (25/3).

"Selanjutnya, kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi itu," ucapnya.

Dalam konteks ini, menurut Kurnia, berarti Antam selaku Sekjen KKP memiliki pengetahuan soal perintah tersebut dan mestinya dapat dikonfirmasi lebih lanjut oleh KPK.

"Lagi pun, ucapan Deputy Penindakan itu seolah-olah ingin menegakkan fakta bahwa Antam sebenarnya telah dikirim surat panggilan sebagai saksi beberapa waktu lalu oleh KPK," ucap Kurnia.

Tak hanya itu, lanjut Kurnia, KKP juga telah melakukan tindakan penyetoran aset berupa uang tunai sekitar Rp 52,3 miliar dari salah satu bank terkait kasus yang menjerat Edhy Prabowo.

Kurnia menyebut, jika dikaitkan dengan pernyataan Deputy Penindakan KPK, terjadi hal yang janggal jika kemudian pihak-pihak tertentu tidak diperiksa sebagai saksi guna mengonfirmasi uang sitaan tersebut.

"ICW curiga pernyataan Deputy Penindakan itu tidak

mewakili sikap para Penyidik KPK, melainkan keinginan pribadi yang enggan memeriksa pihak-pihak tertentu, dalam hal ini termasuk Sekjen KKP, Antam Novambar," katanya.

ICW mendorong agar Pimpinan KPK menegur Deputy Penindakan karena mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan kerja Penyidik KPK.

Karyoto sebelumnya menyebutkan, KPK sudah memiliki cukup bukti dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saksi itu perlu atau tidak. Sebenarnya kemarin tidak perlu memanggil Irjen dan Sekjen (KKP) pun sudah cukup, karena rangkaian aliran dari administrasi itu sudah jelas," kata Karyoto.

Karyoto menyebut bahwa KPK telah merampungkan penyidikan untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan dalam kasus ekspor benih lobster tersebut. Dengan rampungnya penyidikan itu, berarti tidak ada lagi pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara tersebut. ■ han

Menlu Retno dan Menhan Prabowo akan Hadiri Pertemuan 2+2 di Jepang

JAKARTA (IM) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke Tokyo, Jepang, pada 28-30 Maret 2021.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat (23/3), kunjungan keduanya merupakan tindak lanjut kunjungan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide pada Oktober 2020 lalu di Jakarta.

"Agenda utama kunjungan ke Tokyo adalah dalam rangka melakukan pertemuan 2+2 kedua antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara," demikian keterangan tertulis di situs Kemenlu.

Pertemuan 2+2 pertama, diselenggarakan di Tokyo pada tahun 2015 lalu. Rencananya, selama di Jepang, Retno dan Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan masing-masing mitranya.

Antara lain, Retno dengan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, sedangkan Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Jepang Kishi Nobuo.

"Dalam rangkaian pertemuan dimaksud, kedua belah pihak akan membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama," tulis keterangan itu.

Isu tersebut di antaranya upaya untuk menangani pandemi Covid-19, percepatan pemulihan ekonomi masing-masing negara dan kawasan, kerja sama di bidang pertahanan, serta isu-isu strategis regional dan global.

Jepang merupakan mitra dagang Indonesia kedua dengan total nilai perdagangan mencapai 24,3 miliar dollar AS. Bahkan, ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2020 berada di peringkat 14 atau senilai 13,6 miliar dollar AS. Selain itu, Jepang juga merupakan investor keempat terbesar di Indonesia. ■ han

Pedagang Cita Citata Diperiksa KPK terkait Kasus Suap Bansos Covid-19

JAKARTA (IM) - Artis Cita Citata memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam dugaan kasus suap bansos Covid-19 yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara. Pemilik nama asli Cita Rahayu mendatangi KPK dengan berpakaian hitam, Jumat (26/3).

Cita Citata tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pukul 14.45 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian dan masker dengan warna senada yakni hitam. Ia tidak berkomentar apa pun saat tiba. Dia datang didampingi oleh asistennya dan langsung masuk ke lobi gedung KPK.

Diketahui, Cita Citata dipanggil tim penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19. Cita akan dimintai keterangan sebagai saksi.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (26/3).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama sejumlah

orang, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabukke.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar. ■ mei



IDN/ANT

KPK TAHAN RJ LINO

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3). RJ Lino yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015 itu ditahan penyidik KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM "PT. INDO MITRA HASANAH"

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT INDO MITRA HASANAH berkedudukan di Jakarta Selatan dan ber Kantor pusat di MUC Building, Lantai VI, Jalan Tahi Bonar Simatupang 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini diumumkan bahwa Tn. MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN akan melakukan pelepasan sebagian saham dalam Perseroan (akuisisi) kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan/Kreditor yang berkeberatan atas rencana pengambilalihan tersebut dapat menyampaikan kepada Perseroan dengan alamat tersebut di atas dengan disertai alasan/bukti yang sah paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Demi demikian, pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 27 Maret 2021

Ditandatangani,

PT INDO MITRA HASANAH